

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi akan selalu berhadapan dengan situasi yang tidak pasti yang mungkin dapat mendukung atau menghambat organisasi tersebut dalam usaha pencapaian tujuan. Untuk dapat menentukan sikap atau mengambil suatu keputusan dalam menghadapi situasi yang penuh dengan ketidak pastian tersebut, maka para pengelola/manajer memerlukan berbagai informasi.

Informasi sangat perlu untuk pengambilan keputusan strategi guna pencapaian tujuan organisasi. Setiap keputusan yang diambil oleh pengelola/manajer merupakan kumpulan dari berbagai data yang telah diolah. Oleh karena itu informasi telah dianggap sebagai sumber yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi, di samping sumber-sumber daya alam, modal dan manusia.

Keputusan yang baik dapat dihasilkan oleh pengelola/manajer pada setiap tingkat manajemen, apabila tersedia informasi yang efisien, tepat dan up to date. Bagaimana suatu informasi yang disajikan bagi para pengelola/manajer itu tergantung pada baik buruknya sistem informasi manajemen dari perusahaan tersebut.

Dalam suatu organisasi, pengelola/manajer bukan hanya menerima informasi, tetapi juga pemberi informasi, yaitu dalam bentuk perintah, petunjuk dan nasehat. Bagaimana informasi itu sampai kepada pengelola/manajer, diolah menjadi suatu keputusan dan dikirimkan pada orang yang ada di dalam perusahaan serta terakhir

bagaimana umpan balik dari keputusan itu diterima. Semua ini dapat dikatakan sebagai sistem informasi.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada lembaga pemerintah yang dalam hal ini dibatasi pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, maka perihal keberadaan sistem informasi manajemen ini sangat mendukung aktivitas-aktivitas di biro tersebut. Tetapi meskipun demikian tetap saja ditemukan keadaan-keadaan yang menghambat pelaksanaan sistem informasi manajemen di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara. Ketidaksinkronan tersebut adalah dalam hal memberikan informasi kepada atasan masing-masing bagian kerja di dinas tersebut. Ruang lingkup ketidaksinkronan tersebut terutama dalam hal memberikan informasi sekitar tatanan kerja yang akan dilaksanakan dan juga dalam hal keadaan pegawai, sehingga keputusan yang diambil pihak pimpinan yang dalam hal ini Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keadaan penyelesaian dari tatanan kerja yang dilaksanakan serta belum diperhatikannya keadaan-keadaan kepegawaian. Dengan sebab yang demikian maka adalah sangat menarik untuk diadakan pembahasan perihal pelaksanaan sistem informasi manajemen di lingkungan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Salah satu tugas dari Biro Bina Sosial Setdapropsu adalah di bidang pelaksanaan penyuluhan hal-hal yang berhubungan dengan kenakalan remaja yang salah satunya adalah melalui penyuluhan tentang bahaya narkoba. Kenakalan remaja identik sekali dengan penyalahgunaan narkoba.